

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Downing A. Jockson dalam bukunya *The Architecture of Country House* menyatakan Pondok Wisata adalah tempat tinggal dalam ukuran kecil untuk ditempati oleh keluarga dan sebagian besar pondok wisatadidak ditempati oleh masyarakat bawah tetapi oleh orang pekerja, orang yang berwisata yang ingin merubah citra dalam industri pariwisata.

Indonesia merupakan salah satu negara yang turut mengembangkan perekonomiannya melalui industri pariwisata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kekayaan alam dan budayanya yang dapat dijadikan potensi yang besar bagi pengembangan pariwisata, meskipun begitu pengembangan kepariwisataan Indonesia masih belum maksimal. Sementara belum tergarap dengan dampak negatif banyak hal yang berbeda, terutama disebabkan oleh pengembangan pariwisata yang dilakukan semata-mata dengan pendekatan ekonomi dimana pariwisata dipersepsikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan, terutama pada bidang usaha swasta dan pemerintah. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan pengembangan pariwisata menjadi sangat eksploitatif terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam (Suwantoro, 2004:80).

Indonesia banyak sekali memiliki tempat wisata salah satunya adalah Hutan Pinus.Hutan pinus terletak disebuah Desa Mangunan, Kecamatan

Dingo Kabupaten Bantul, DIY. Kawasan resor pengelolaan hutan seluas 500 hektar itu sebagian kecil areanya ditanami pinus.

Deretan tegakan ribuan pohon pinus yang tertata rapi memberikan kesejukan dan kesegaran, bahkan anak-anak seakan menemukan dunianya sendiri, berlarian, menyelinap atau bermain petak umpat di lorong-lorong pohon pinus dan kawasan ini juga menjadi tempat liburan anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan juga tempat perkemahan anak-anak sekolah, dan juga tempat berlibur keluarga besar dari luar-luar kota untuk menikmati keindahan hutan pinus dan pemandangannya yang begitu menarik salah satunya gardu pandang. Dengan latar belakang pohon pinus, lokasi ini juga dijadikan spot foto oleh para calon pengantin untuk mengambil foto “*prewedding*”, hingga juga pernah menjadi lokasi shooting film FTV.

Hutan pinus Mangunan kini memang menjadi destinasi wisata. Kawasan itu berjarak sekitar 30 kilometer dari Yogyakarta. Kondisi jalan disana beraspal mulus dan terdapat papan penunjuk arah. Pada tahun 1965 hutan ini adalah hutan produksi kayu putih yang dibabat tangan tidak bertanggung jawab, menjadikan hal ini gundul. Kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY memulihkannya lewat reboisasi tahun 1985, ditanami mahoni, akasia, kemiri dan pinus. Tanaman pinus itu tumbuh subur dan kini menjadi daya pikat para pelancong.

Hutan pinus ini adalah salah satu obyek wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Masyarakat berperandalem pengelolaan obyek wisata hutan pinus, mulai dari bergotong royong perbaikan lahan, kebersihan,

keamanan, dan lain-lain. Menurut informasi yang diperoleh dari pengelola obyek wisata hutan pinus ini bapak Suratman sebagai ketua masyarakat yang mengelola obyek wisata hutan pinus ini menyatakan.

“Memang kita sebagai pengelola belum membuat iklan atau promosi-promosi khusus untuk obyek wisata ini, saat ini informasi-informasi mengenai obyek wisata hutan pinus ini hanya melalui mulut ke mulut bagi pengunjung yang sudah pernah mengunjungi lokasi ini dan dari pengunjung tersebutlah yang mempromosikan ini kesesama mereka dan ada juga yang melalui media dan lain sebagainya”.

Obyek wisata ini mulai dibuka untuk umum tahun 2012. Akan tetapi pada saat itu pengunjung belum begitu banyak yang mengetahui dan masih sepi. Akan tetapi dua tahun belakangan ini mulai dari tahun 2014 hingga 2016 jumlah pengunjung melonjak tinggi apalagi pada hari Sabtu dan Minggu. Masuk area ini, pengunjung membayar parkir untuk roda empat sebesar Rp 10.000 dan untuk roda dua Rp 3.000. Khususnya untuk foto *prewedding*, para calon pengantin dikenakan retribusi Rp 50.000.

Jumlah pengunjung kusunya pada hari Sabtu dan Minggu lebih banyak dari pada hari-hari kerja dalam perkiraan yaitu sekitar ratusan hingga ribuan pengunjung baik yang datang dari dalam Kota Yogyakarta maupun dari luar Yogyakarta (Informasi diperoleh dari wawancara pengelola wisata bapak Suratman).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peran masyarakat setempat dalam mengelola obyek wisata hutan pinus tersebut sehingga bisa menarik wisatawan diluar Kota dan dalam kotahingga dari manca Negara. Peneliti tertarik memilih judul untuk penelitian ini adalah: Pengelolaan ObyekWisata Berbasis Masyarakat Di

Hutan Pinus DesaMangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti menentukan rumusanmasalah yaitu: “Bagaimana Pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat Di Hutan Pinus Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat di obyek wisata hutan pinus.

2. Tujuan Khusus

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai obyek wisata hutan pinus di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini adalah dapat memperkaya kajian-kajian bagi akademisi khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan terutama peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang peran masyarakat khususnya obyek wisata hutan pinus di Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sekitar dalam mengembangkan obyek wisata yang ada dan menambah penghasilan masyarakat.

c. Bagi Kajian Sejenis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa tentang peran masyarakat dalam mengelola obyek wisata hutan pinus dalam melakukan penelitian yang sejenis.

E. Kajian Teori

1. Obyek Wisata

Menurut M. Ngafenan (1997:27), "Obyek Wisata adalah segala obyek yang dapat menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan untuk dapat mengunjunginya. Misalnya keadaan alam, bangunan bersejarah,

kebudayaan dan pusat-pusat rekreasi modern.” Dalam buku Istilah-Istilah Dunia Pariwisata (2001:128), Obyek Wisata adalah: Pada garis besarnya berwujud obyek, barang-barang mati atau statis, baik yang diciptakan oleh manusia sebagai hasil seni dan budaya, ataupun yang berupa gejala-gejala alam, yang memiliki daya tarik kepada para wisatawan untuk mengunjunginya agar dapat menyaksikan, mengagumi, menikmati, sehingga terpenuhilah rasa kepuasan wisatawan-wisatawan itu sesuai dengan motif-motif kunjungannya. Istilah-istilah yang berkaitan dengan obyek wisata, antara lain sebagai berikut:

- a. Obyek Wisata Perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
- b. Obyek Wisata Alam Obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.
- c. Obyek Wisata Budaya Obyek yang daya tariknya bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan obyek lain yang berkaitan dengan kebudayaan.

2. Pengelolaan obyek wisata

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut dalam skala aktifitas juga dapat diartikan sebagai aktifitas menerbitkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu

mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan yang lainnya (Munir, 2006: 9).

Spillance (dalam Oka Yoeti 1999) mengemukakan bahwa objek wisata merupakan suatu areal atau wilayah yang terdapat dimuka bumi yang memiliki cirri khas berupa keindahan alamnya. Tentunya sesuatu atau suatu wilayah dapat dijadikan sebagai objek wisata tidak hanya tergantung pada keindahan fenomenanya, melainkan juga karena kekhasanya yang dimiliki oleh objek tersebut. Objek wisata adalah suatu tempat atau benda yang memiliki cirri khas tersendiri dan memiliki daya tarik tersendiri, sehingga mengundang perhatian banyak orang untuk menyaksikannya. Begitu pula halnya seperti yang diungkapkan oleh Norwal (dalam Munadi 1953;39) bahwa objek wisata adalah “suatu tempat yang memiliki daya tarik baik itu karena keindahannya ataupun nilai historis yang terkandung di dalamnya.

a. Daya Tarik Wisata

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Menurut Yoeti (1996:178), suatu daerah tujuan wisata hendaknya memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Ketersediaan sesuatu yang dapat dilihat (*something to see*). Artinya, di tempat tersebut harus ada daya tarik yang berbeda dengan apa dimiliki daerah lain.
- 2) Sesuatu yang dapat dilakukan (*something to do*). Artinya, di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus pula disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat mereka betah tinggal lebih lama di tempat itu.
- 3) Sesuatu yang dapat dibeli (*something to buy*). Artinya, di tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke tempat asal masing-masing.

Menurut Yoeti (2006:167), secara garis besar terdapat empat kelompok yang merupakan daya tarik bagi wisatawan datang pada suatu negara daerah tujuan wisata tertentu, yaitu: *natural attraction*, *build attraction*, *cultural attraction*, dan *social attraction*.

- 1) *Natural Attraction*, termasuk dalam kelompok ini adalah pemandangan alam, laut, pantai, danau, air terjun, kebun raya, agrowisata, gunung berapi, serta flora dan fauna.
- 2) *Build Attraction*, termasuk dalam kelompok ini adalah bangunan dengan arsitektur yang menarik, seperti rumah adat, bangunan kuno dan bangunan modern.
- 3) *Cultural Attraction*, dalam kelompok ini termasuk diantaranya peninggalan sejarah (*historical building*), cerita-cerita rakyat

(*folklore*), kesenian tradisional, museum, upacara keagamaan, festival kesenian dan sebagainya.

4) *Social Attraction*, yang termasuk kelompok ini adalah tata cara hidup suatu masyarakat (*the way of life*), ragam bahasa (*languages*), upacara perkawinan, upacara potong gigi, khitanan dan kegiatan sosial lainnya.

Wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata memerlukan berbagai kebutuhan dan pelayanan mulai dari keberangkatan sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya. Aktivitas pariwisata sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti yang dilakukan setiap hari, wisatawan juga membutuhkan makanan dan minuman, tempat menginap, serta alat transportasi yang membawanya pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Menurut Cooper dalam Suwena (2010:88), untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan tersebut, daerah tujuan wisata harus didukung empat komponen utama atau yang dikenal dengan istilah “4A” yaitu: *Attraction* (atraksi), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenities* (fasilitas), dan *Ancillary Services* (pelayanan tambahan).

b. Potensi Obyek Wisata

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat disuatu daerah tertentu yang bisa dikembangkan menjadi daya Tarik wisata. dengan kata lain potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat dikembangkan menjadi suatu

atraksi wisata (*tourist attraction*) yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya (Pendit,2003).

Daya Tarik atau atraksi wisata menurut yoeti (1996) adalah segala sesuatu yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata seperti:

- 1) Alam (*nature*): yaitu segala Sesutu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dan diusahakan ditemat objek wisata yang dapat dinikmati dan memberikan kepuasan terhadap wisatawan. Contohnya pemandangan alam,pegunungan,flora dan fauna.
- 2) Budaya (*culture*): segala sesuatu yang berupa daya Tarik yang berasal dari seni dan kreasi manusia. Contohnya, upacara keagamaam,upacara adat,dan tarian tradisional.
- 3) Buatan manusia (*Man made*): segala sesuat yang berasal dari karya manusia dan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti benda benda sejarah,budya,religi serta tata cara manusia.

c. Fasilitas Obyek Wisata

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan.kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikn objek wisata melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/penginapan, restoran dan

toko cendramata), transportasi (jalan alternatif, aspal, hotmik, dan jalan setapak), kendaraan (angkutan umum, becak, ojek, sepeda) dan lain-lain (mushalla, tempat parkir, MCK, shetler).

d. Aksesibilitas Obyek Wisata

Aksesibilitas dalam pariwisata berkenaan dengan tingkat kemudahan seseorang wisatawan mencapai suatu objek wisata. Aksesibilitas penting diperhatikan, meningkatkan aspek tersebut bisa memberikan pengaruh yang besar bagi wisatawan. Fasilitas transportasi dalam kepariwisataan sangat erat hubungannya dengan aksesibilitas. Maksudnya frekuensi penggunaan kendaraan yang dimiliki dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah menjadi lebih dekat.

Hal ini dapat mempersingkat waktu dan tenaga serta lebih meringankan biaya perjalanan. Menurut trihatmodjo dalam Yoeti (1997:5) bahwa aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ketempat tujuan tersebut. Beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas suatu tempat adalah jalan, tarif angkutan, jenis kendaraan, jaringan transportasi, jarak tempuh dan waktu tempuh. Semakin baik aksesibilitas suatu objek wisata, wisatawan yang berkunjung dapat semakin banyak jumlahnya. Sebaliknya jika aksesibilitasnya kurang baik, wisatawan akan merasakan hambatan dalam kunjungan yang dilakukan dalam berwisata

e. Promosi Obyek Wisata

Pengertian promosi menurut menurut Saladin (2003: 123).
“Promosi adalah sejenis komunikasi yang memberi penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian, mendidik, meningkatkan, dan meyakinkan calon konsumen.

Oleh karena itu pengelola obyek wisata harus berusaha untuk memperkenalkan obyek wisata, meyakinkan dan mempengaruhi pengunjung agar dapat menciptakan permintaan atas obyek tersebut.

Dalam konsep promosi pariwisata ada 2 (dua) faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

1) Alat alat pemasaran

Pemasaran pariwisata baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta industri pariwisata harus dilaksanakan dengan strategi pemasaran bauran (*marketing mix*). Strategi ini sangat diperlukan karena pariwisata adalah industri yang sifatnya sangat kompleks. Alat alat pariwisata dapat yang dilaksanakan dengan strategi bauran pemasaran (*marketing mix*).

2) Strategi Pemasaran

Agar pemasaran dapat dilakukan dengan efisien dan memperoleh hasil capaian pemasaran yang maksimal maka perlu upaya pemasaran dengan memperhatikan segmen pasar (Segmentation). Segmentasi adalah Suatu upaya untuk

mengelompokkan pasar yang sangat beragam ke dalam pasar yang relatif sama. Melalui keanekaragaman produk yang sangat tinggi mempunyai peluang yang sangat besar dalam memperoleh sasaran pasar yang sangat beranekaragam pula. Oleh karenanya perlu melakukan kajian terhadap pasar untuk mengelompokkannya. Pengelompokan tersebut akan memudahkan untuk menentukan langkah-langkah yang efektif dalam rangka promosi pariwisata.

3. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Berbicara mengenai pembangunan berbasis masyarakat, maka sebenarnya secara tidak langsung berbicara mengenai pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Hal ini dapat terjadi karena kata masyarakat di situ bukanlah hanya sebagai suatu institusi sosial, tetapi juga sebagai manusia yang merupakan individu dalam masyarakat. Tujuan pembangunan sosial menurut pandangan UN-ESCAP pada dasarnya adalah pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Berdasarkan tujuan tersebut, UN-ESCAP melihat bahwa penekanan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah pembangunan yang berpusat pada manusia, sehingga terlihat kesamaan pola gerak dari pembangunan sosial dan pembangunan yang berpusat pada manusia, yaitu pada upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri (Adi, 2008: 66).

Pembangunan menurut pengertian umum adalah suatu upaya terencana untuk merubah wilayah dan masyarakat menuju keadaan lebih baik. Dari tinjauan Ilmu sosial, Pembangunan diartikan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Strategi Pembangunan berkembang dari masa ke masa secara dinamis sesuai dengan konteks peradaban. Paradigma Pembangunan yang menekankan pada Pembangunan ekonomi mulai ditinggalkan karena tidak dapat menjawab masalah sosial seperti kemiskinan, kenakalan, kesenjangan, dan keterbelakangan. Paradigma pembangunan kemudian bergeser ke arah pendekatan masyarakat yang sebelumnya sebagai objek menjadi subjek Pembangunan. Paradigma baru ini berbasis komunitas dengan memberikan tempat utama bagi prakarsa, keanekaragaman lokal, dan kearifan lokal.

Keunggulan pembangunan berbasis masyarakat mengarahkan perkembangan pada:

- a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan
- b. Konsep teknologi tepat guna, *indigenous technology*, *indigenous knowledge* dan *indigenous institutions* sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi
- c. Tuntunan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan

- d. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru
- e. Lembaga swadaya masyarakat
- f. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan.

Pembangunan berbasis masyarakat menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Keberdayaan memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan. Sebagian besar masyarakat berdaya adalah individunya memiliki kesehatan fisik, mental, terdidik, kuat dan berbudaya. Membudayakan masyarakat adalah meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu lepas dari kemiskinan, kebodohan, ketidaksehatan, dan ketertinggalan. Untuk mendorong masyarakat berdaya dengan cara menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pengembangan daya tersebut dilakukan dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat. Penguatan tersebut meliputi penyediaan berbagai masukan serta membuka akses pada berbagai peluang yang ada. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dengan inti pemberdayaan adalah transformasi manajemen komunitas menuju kesejahteraan bersama. Pemberdayaan ini merupakan sarana ampuh untuk keluar dari kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan menuju kesejahteraan bersama.

Pembangunan yang berbasis masyarakat yang menempatkan posisi masyarakat sebagai actor/ manajer pembangunan dan hanya sedikit melibatkan intervensi pihak lain seperti LSM maupun pemerintah. Sumbangan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan diantaranya:

- a. Meningkatkan kapasitas lokal, program pelatihan/transfer teknologi.
- b. Program pemeliharaan fasilitas umum termasuk pemeliharaan prasarana jaringan air minum pedesaan.
- c. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai program-program apa yang dibutuhkan dan bersifat krusial bagi masyarakat lokal.

Karakteristik prasarana merupakan kondisi dan kinerja prasarana untuk dapat mendukung aktifitas masyarakat. Prasarana yang secara teknis sederhana misalnya pasca pembangunan jaringan perpipaan air minum pedesaan yang dapat dikelola dan dibiayai oleh komunitas masyarakat sendiri. Masyarakat akan berperan serta untuk memelihara dan mengelola prasarana yang telah dibangun bila mereka mendapat mamfaat langsung dari prasarana tersebut atau berhubungan dengan kinerja prasarana. (Ndraha, 1990:105) Prasarana lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat akan memberikan pengaruh positif pada manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat merangsang tumbuhnya rasa ikut memiliki yang pada akhirnya akan tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan

hasil-hasil pembangunan berupa perbaikan/ pemeliharaan (Yudhohusodo dkk, 1991:148).

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pembangunan berbasis masyarakat, yaitu daya tarik wisata dan integrasi objek wisata, fasilitas sarana prasarana pelayanan wisata, manajemen pengelolaan, dan sumber daya manusia. Arahan pembangunan berbasis masyarakat terdiri dari:

- a. Arahan pengembangan zonasi desa wisata
- b. Arahan pengembangan atraksi wisata
- c. Arahan pengembangan sarana prasarana
- d. arahan pengembangan aksesibilitas
- e. arahan pengembangan sumber daya manusia
- f. Arahan pengembangan promosi dan pemasaran wisata

4. Prinsip-prinsip, Manfaat, Pendukung dan Penghambat Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan sejenis kepariwisataan yang perkembangan dan pengelolaannya dikontrol oleh masyarakat lokal, dimana bagian terbesar dari manfaat yang dihasilkan kepariwisataan tersebut dinikmati oleh masyarakat lokal baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kepariwisataan tersebut. Pariwisata berbasis masyarakat memiliki beberapa karakteristik yaitu adanya pendidikan dan interpretasi sebagai bagian dari produk wisatanya, meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan pengunjung terhadap pentingnya upaya konservasi, umumnya diperuntukkan bagi wisatawan

dalam jumlah kecil oleh usaha jasa yang dimiliki masyarakat lokal, meminimalisir dampak negatif terhadap alam dan lingkungan sosial-budaya dan mendukung upaya perlindungan terhadap alam. (Hausler dan Strasdas, 2002).

Prinsip-prinsip dari konsep pariwisata berbasis masyarakat (CBT) yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip pendidikan (edukasi), prinsip konservasi alam, prinsip konservasi budaya, dan prinsip ekonomi lokal. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan mengidentifikasi prinsip apa saja yang diterapkan dalam penataan dan pengelolaan kepariwisataan di Pantai Kedonganan, serta bagaimana langkah/proses penerapannya, siapa yang terlibat dalam proses tersebut dan bagaimana cara/metode ataupun proses penerapannya.

Jika diimplementasikan dengan baik, pariwisata berbasis masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui keuntungan usaha dan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, memulihkan kondisi ekonomi dan memperbaiki infrastruktur. Pariwisata berbasis masyarakat bahkan mendukung efektifitas ekonomi lain baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Selain itu, pariwisata berbasis masyarakat dapat membangun jejaring antara sektor yang terkait dan menciptakan pasar untuk produk wisata yang telah disiapkan, berkontribusi untuk menyeimbangkan pembangunan, menyediakan keragaman ekonomi,

menghapus ketergantungan ekonomi terhadap sektor tertentu, meratakan distribusi kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh penghasilan.

Di bidang sosial-budaya, pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kualitas SDM lokal melalui program pelatihan dan pendidikan, mendukung organisasi masyarakat lokal dalam hal meningkatkan kapasitas, membangun jejaring dan keterlibatan mereka dalam pengembangan pariwisata di daerahnya dan memungkinkan terciptanya tata kelola kepariwisataan yang baik melalui keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan di segala tingkatan. Pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, meningkatkan kebanggaan mereka terhadap daerah dan budayanya, meningkatkan kerukunan, memberdayakan masyarakat dan menciptakan persamaan sosial, mengurangi emigrasi dan memicu imigrasi. Pariwisata berbasis masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal, meningkatkan tingkat kesehatan melalui perbaikan sanitasi dan sistem pengelolaan limbah, fasilitas umum dan infrastruktur (air, listrik dan telekomunikasi), menjaga dan mempromosikan budaya lokal, tempat bersejarah, dan alam melalui peningkatkan kesadaran masyarakat lokal terhadap pentingnya konservasi serta menyediakan dukungan dana yang dihasilkan dari keberadaan kepariwisataan di suatu daerah. Pariwisata berbasis masyarakat dapat meningkatkan hubungan dan jejaring antar budaya melalui pertukaran budaya dan dialog antara masyarakat lokal dan wisatawan.

Manfaat pariwisata berbasis masyarakat terhadap lingkungan adalah dapat mendorong pemanfaatan berkelanjutan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang sensitif, menghindari eksploitasi dan ketergantungan terhadap satu sumber daya, mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara tidak konsumtif, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan di tingkat nasional dan lokal, serta meningkatkan pemahaman terhadap hubungan antara lingkungan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Tasci et al, 2013).

Pernyataan menunjukkan bahwa kegagalan program pariwisata berbasis masyarakat di antaranya diakibatkan oleh ketidakmampuan program tersebut menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketidakmampuan tersebut pada dasarnya berpangkal dari ketidakmampuan masyarakat pelaksana program untuk memastikan diperolehnya manfaat baik dari penguasaan lahan, kurangnya kemampuan dalam hal pengelolaan, termasuk pemasaran dan keterampilan wirausaha, kurangnya keterlibatan masyarakat, kurangnya rasa memiliki masyarakat, serta kesulitan dalam hal pendanaan. Berkaitan dengan hal tersebut, Asker et al (2010 : 4) menyatakan bahwa agar pariwisata berbasis masyarakat dapat diterapkan dengan baik, dibutuhkan suatu pre-kondisi.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Kata partisipasi diserap dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti "*the act of taking part in an activity or event*" (Oxford Advanced

Learner's Dictionary), yang artinya adalah tindakan berupa ikut serta dalam suatu kegiatan atau acara. Keikutsertaan masyarakat (partisipasi masyarakat) merupakan salah satu karakteristik penting dari pariwisata berbasis masyarakat. (Hausler & Strasdas dalam Prasiasa, 2013). Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengembangan kepariwisataan di destinasi pariwisata bahkan dikatakan sebagai syarat utama keberhasilannya (Pitana dalam Prasiasa, 2013).

Arnstein menyatakan bahwa partisipasi warga Negara merupakan pendistribusian kembali kemampuan yang memungkinkan warga Negara yang tidak mampu untuk tidak lagi terpinggirkan secara politik maupun ekonomi. Partisipasi merupakan strategi yang memungkinkan warga Negara yang tidak mampu untuk ikut bergabung dalam menentukan bagaimana informasi dibagikan, bagaimana tujuan dan kebijakan ditentukan, bagaimana pajak dialokasikan, program dijalankan, serta bagaimana manfaat dirasakan secara lebih merata. Dengan kalimat lain dapat dinyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu alat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menimbulkan terjadinya perubahan sosial yang akan memberdayakan mereka dalam masyarakat.

Arnstein (dalam Prasiasa, 2013) menyatakan bahwa terdapat 8 tipe partisipasi yang disusun seperti susunan tangga (*ladder of participation*). Tangga terbawah menunjukkan tipe partisipasi dengan kadar paling rendah. Semakin tinggi posisi anak tangga, semakin tinggi pula kadar partisipasinya. Adapun tipe partisipasi menurut Arnstein dari kadar

terendah sampai tertinggi adalah: *Manipulation, Theraphy, Informing, Consultation, Placation, Partnership, Delegated Power, dan Citizen control*. Delapan tipe partisipasi tersebut dibagi lagi oleh Arnstein menjadi 3 kelompok tipe partisipasi, dimana tipe *manipulation* dan *theraphy* dikelompokkan sebagai “*non-participation*”, tipe *informing, consultation* dan *placation* dikelompokkan sebagai “*Degrees of Tokenism*”, dan *partnership, delegated power, dan citizen control* dikelompokkan sebagai “*Degrees of Citizens Power*”.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep untuk membahas Pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat Di Hutan Pinus Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta.

1. Pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat

Pembangunan yang berbasis masyarakat yang menempatkan posisi masyarakat sebagai actor/ manager pembangunan dan hanya sedikit melibatkan intervensi pihak lain seperti LSM maupun pemerintah.

Masyarakat akan berperan serta untuk memelihara dan mengelola prasarana yang telah dibangun bila mereka mendapat manfaat langsung dari prasarana tersebut atau berhubungan dengan kinerja prasarana (Ndraha,1990:105).

Usaha masyarakat pada tingkat ini merupakan bentuk usaha pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*

development), sehingga mampu membantu dalam mengkondisikan stabilitas ekonomi masyarakat. Mereka mempunyai andil untuk tetap menjadikan Bali sebagai tujuan wisata yang dibanggakan dan andil dalam mencapai stabilitas ekonomi rakyat. Atas dasar itu usaha jasa pariwisata berupa pondok wisata secara intensif dan rutin mendapatkan bimbingan, binaan dan selalu dipantau untuk diarahkan agar mereka menjaga kualitas layanan kepada wisatawan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Dengan keberhasilan menggiatkan masyarakat pengusaha kecil pondok wisata, dari segi ekonomi maupun segi kelestarian lingkungan dan budaya melalui mempengaruhi sifat pribadi (*behavior*) untuk melakukannya maka program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dalam program mengembangkan daerah akan berhasil. Untuk pelestarian nilai budaya mendasarkan nilai filosofi agama Hindu Bali terangkun dalam filsafat Tri Hita Kirana. Yang artinya agar tetap menjaga tiga penyebab kesejahteraan manusia, yakni dari hasil hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungan *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun, (2005).*

Jamieon 2001 dalam Janianton, (dalam Sujali, 2008) mengutarakan hasil penelitian di Philipina yakni kegiatan pariwisata di negeri ini mampu mengangkat kondisi masyarakat miskin, pariwisata mampu meningkatkan kedatangan wisatawan dan meningkatkan pendapatan.

Peneliti lain seperti Manat, (dalam Sujali, 2008) dalam penelitian di Phuket Thailand menemukan hasil kajian bahwa usaha, pariwisata

mampu menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja (mengurangi kemiskinan). Dari jumlah pekerja 12.315 orang, dapat terserap pada sektor pariwisata 90%, dan hanya 40% diantara mereka bekerja pada sektor formal, sehingga sebagian besar (60%) bekerja pada bidang pariwisata sektor non formal.

Maneewan, (dalam Sujali, 2008) hasil penelitian "Pasar Apung" di Thailand diperoleh kesimpulan antara lain, keberadaan usaha pasar apung, dapat memperpanjang lama tinggal (*length of stay*) wisatawan sebagai konsumen dan dapat mendistribusikan pendapatan pada sektor jasa angkutan, pemanduan dan makanan, serta pada sektor usaha cinderamata. Dari proses kegiatan usaha kepariwisataan tersebut nampak bahwa usaha pariwisata mampu mewujudkan bentuk *trickle-down effect* yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tumbuh dan kembangnya usaha hilir atau usaha yang lain, ini merupakan usaha spontan dari kemandirian atau pengembangan masyarakat.

David L Andersen dalam Lindberg K, (dalam Sujali, 2008) memberikan hasil kajian dalam penyediaan sarana ekoturisme yang sesuai. Ia mengatakan bahwa jaringan hotel besar seperti Marriott Corporation mencoba menyediakan kamar-kamar hotel yang berwawasan lingkungan yakni bahan-bahan dan teknik konstruksi yang digunakan berdampak kecil pada lingkungan. Choices Hotel melengkapi ruangan-ruangan dengan kotak-kotak untuk fasilitas hotel dari hasil daur ulang, serta memberikan himbauan kepada tamu agar tamu-tamu hotel yang menginap melakukan

kegiatan pelestarian lingkungan. Selain itu semua, kedua hotel besar juga membuat program dengan mengembangkan hubungan kerjasama antar hotel-hotel besar di perkotaan dengan hotel-hotel di pinggiran pantai agar berpartisipasi dalam menyediakan sarana ekowisata dengan ukuran kecil, sehingga dengan sarana berukuran kecil mampu mengurangi beban atau *carrying capacity* lingkungan kecil.

Kesepakatan antara Pusat Studi Pariwisata UGM dengan Kantor Menko Kesra yang membahas peranan usaha kepariwisataan mengarah kepemihakan kepada masyarakat ekonomi lemah antara lain: (1) mereka sebagai pemasok tenaga kerja (2) mereka sebagai pemasok barang dan jasa pariwisata (3) mereka diberi peluang menjual barang dan jasa secara langsung kepada wisatawan (4) mereka didorong sebagai pelaku dan pemilik usaha jasa pariwisata (5) mereka memperoleh keuntungan dari investasi infrastruktur (6) mereka berkesempatan mendapatkan pelatihan bidang pariwisata (7) mendorong munculnya entitas-entitas kelembagaan baru dan (8) mengoptimalkan potensi-potensi lokal dalam pembangunan pariwisata Janianton, (dalam Sujali, 2008).

Para pengelola pondok wisata kawasan Ubud dengan kondisi ekonomi masih lemah apakah sudah mampu berperan seperti dimaksud di muka, oleh karen itu perlu dikaji lebih mendalam. Permasalahan kebersihan lingkungan, pencemaran lingkungan tidak mudah untuk dilaksanakan pemecahannya, karena pemahaman masing-masing individu terhadap pemecahan masalah lingkungan belum sama.

Menurut pendapat Muhadjir Nung, (dalam Sujali, 2008) apabila pada lingkungan paling sempit yakni individu atau keluarga inti sudah merasakan bahwa lingkungan sekitarnya tidak nyaman dan menimbulkan masalah sosial. Akan tetapi apabila masalah tersebut sudah dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga konsep pentingnya peran serta masyarakat (*kumpulan antar individu atau keluarga*) dapat diterapkan dalam pemecahan masalah sosial. Oleh karena itu penelitian dengan pendekatan sikap dan perilaku usaha jasa pariwisata apakah sudah ramah lingkungan dapat diketahui. Selain itu dalam mengatasi masalah dan membuat kebijakan sosial dilakukan dengan dua sistem, yakni sistem sistemik dan sistem sinergik. Masalah sosial dan masalah lingkungan yang merupakan permasalahan individual, namun tidak mudah diatasi dengan sistem individual, maka perlu dilakukan secara komprehensif dan sistemik.

1. Mengetahui pemahaman para pengelola/pengusaha pondok wisata dengan mendasarkan pada kebijakan pengelolaan ramah lingkungan.
2. Menganalisa persepsi dan perilaku para pengelola/pengusaha pondok wisata dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Daerah No.3 th 2005 terkait dengan pengembangan kepariwisataan.
3. Membuat model dengan pendekatan sosial untuk pencapaian pengelolaan pondok wisata ramah lingkungan berbasis pengembangan masyarakat.

2. Pengelolaan Obyek Wisata

Pengelolaan dapat diartikan sebagai management, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu maupun kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam kepariwisataan yang merupakan satu industri yang kompleks, maka organisasi – organisasi pariwisata nasional, khususnya di negara – negara penerima wisatawan, harus ditata, diorganisasi dan dijalankan menurut konsep – konsep manajemen dan pemasaran ilmiah modern, seandainya tujuan – tujuan nasional untuk meningkatkan pertumbuhan pariwisata ingin dicapai.

Menurut Salah Wahab (dalam Andriyani, 2009) dalam bukunya Manajemen Kepariwisata, manajemen itu meliputi lima unsur pokok baik dalam pemikiran dasarnya maupun dalam penerapannya, yaitu :
(dalam Andriyani, 2009)

- a. Pengorganisasian
- b. Perencanaan
- c. Motivasi
- d. Penempatan Personal dan Penggerakannya
- e. Koordinasi dan Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen ini dapat diterapkan pada sektor yang dapat dikaji disetiap jenis usaha dalam bidang perindustrian, pertanian, jasa – jasa atau pariwisata. Ketiga alat utama manajemen adalah keuangan, produksi dan pemasaran. Hal biasa yang berkaitan dengan ketiganya ini

tentu saja manajemen kepegawaian dan lapisan perekatnya tentu saja administrasi sebagai konsekuensi wajar yang diperlukan (Andriyani, 2009).

Fungsi – fungsi manajemen ini tentu saja dikaji dan ditangani secara berbeda pada berbagai sektor dan usaha, serta hal ini bergantung pada seni pengelolaan manajer maupun hakikat sektor usaha yang ditekuninya serta penekanan alat – alat manajemen yang didahulukan. Situasi lingkungan *ekstern* dan *intern* badan usaha membawa tekanan yang dapat menjadi suatu unsur penting untuk kesuksesan atau kegagalan. Sekali lagi, bakat manajemen dari pimpinan tertinggi badan usaha itu memainkan peranan utama dalam konteks ini.

Pariwisata adalah perpindahan sementara orang – orang dari berbagai macam tempat tinggal, iman dan agama, dan yang mempunyai pola hidup yang berbeda, beragam harapan, banyak jenis kesukaan dan hal – hal yang tidak disukai serta motivasi – motivasi yang tidak dapat dibuat standarnya karena kesemuanya ini adalah ungkapan pikiran dan endapan perasaan serta tingkah laku yang berubah dalam jangka panjang menurut tempat dan waktu. Karena itu, pariwisata adalah suatu gejala yang sangat sensitif yang memerlukan cara penanganan yang berbeda. Penataan dan penanganan organisasi pariwisata sebagai suatu sektor ekonomis, dalam arti pimpinan harus merumuskan sumber – sumber yang tersedia dan mengaturnya secara berdaya guna dan tepat guna. Hal ini memerlukan suatu pengkajian yang terus – menerus mengenai fungsi – fungsi dan

penyesuaian organisasi pariwisata di negara itu (organisasi pariwisata nasional, berbagai asosiasi profesi pariwisata dan badan – badan usaha pariwisata) dengan teknik dan perilaku lembaga – lembaga yang begitu cepat berkembang dan berubah. Hal ini pada akhirnya akan lebih mengarah pada suatu organisasi yang terpola menurut sistem berpikir manajemen (Andriyani, 2009).

Uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pengelolaan obyek wisata adalah mengembangkan pariwisata dengan melakukan inventarisasi semua sumber khasanah wisatanya yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan wisata kemudian mencoba untuk mengenali dan mengklasifikasikannya yang kemudian dilanjutkan dengan membuat suatu evaluasi yang realistis. Sasaran utamanya yakni untuk meyakinkan secara baik mengenai pemanfaatan sumber – sumber pariwisata dengan mempertimbangkan nilai bobotnya pada jajaran persaingan yang dihadapi. Hal ini tidak berarti hanya merupakan penilaian yang abstrak tetapi suatu evaluasi yang dites kebenarannya dengan produk wisata pesaing dengan memperhatikan kecenderungan dan ciri – ciri khas permintaan pariwisata yang mempersyaratkan dan mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana wisata yang tidak dapat diciptakan terlepas dari kebutuhan – kebutuhan dan selera – selera permintaan pariwisata.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan alur penulis dalam melakukan penelitian. Definisi operasional dibuat berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian, serta menggambarkan secara singkat alur penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Sofian Effendi (2006: 46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Penelitian terhadap pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta, akan menganalisis data dengan menggunakan indikator indikator sebagai berikut:

1. Indikator dari pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat di Hutan Pinus Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta yang meliputi:
 - a. Potensi Fisik yang terdapat di Obyek Wisata Hutan Pinus
 - b. Fasilitas wisata yang terdapat di Obyek Wisata Hutan Pinus
 - c. Aksesibilitas tempat wisata hutan pinus
 - d. peranan masyarakat dalam mempromosikan Obyek Wisata Hutan Pinus
2. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat
 - a. Faktor pendukung pengelolaan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat
 - 1) Manajemen pengelolaan
 - 2) Daya Tarik wisata dan integrasi obyek wisata

- 3) Sumber daya manusia
 - 4) Promosi dan pemasaran
- b. Faktor penghambat
- 1) Fasilitas sarana dan prasarana
 - Air bersih
 - Listrik
 - Fasilitas kesehatan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:4) mengemukakan bahwa metode deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan detail tentang proses-proses yang terjadi dalam ruang lingkup setempat. Penelitian kualitatif merupakan wujud kata-kata daripada deretan angka.

Metode penelitian kualitatif dengan penelitian yang menghasilkan data. Data yang dianalisis di dalamnya berbentuk deskriptif atau lebih kita kenal sebagai penjelasan dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif menggunakan latar

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang ada.

Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian (dalam Moleong, 2007:85). Tahapan ini disusun secara sistematis agar diperoleh data secara sistematis pula. Ada empat tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian, yaitu:

a. Tahap Pra-lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Memilih dan Memanfaatkan Informan
- 4) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

b. Tahap Lapangan

Dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu:

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- 2) Memasuki Lapangan
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data

c. Tahap Analisa Data

Analisa data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data (Moleong, 2007:103).

Pada tahap ini data yang diperoleh dari berbagai sumber, dikumpulkan, diklasifikasikan dan analisa dengan komparasi konstan.

d. Tahap Penulisan Laporan

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan laporan. Penulisan laporan yang sesuai dengan prosedur penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik pula terhadap hasil penelitian.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Masyarakat Dalam Mengelola Obyek Wisata Hutan Pinus Di Desa Mangunan, Kecamatan Dingo Kabupaten Bantul Yogyakarta dan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peran Masyarakat. Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Menurut Arikunto (2006:200) subjek penelitian adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan dengan tidak adanya subjek penelitian, karena seperti yang telah diketahui bahwa dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus dipecahkan, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan.

Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu (Umar, 2003:303). Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu) (Sugiyono, 2005:13).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban (Moloeng, 2006:186). Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpulkan dan meluruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Menurut Arikunto (2006: 129) didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Bodgan dan Biklen (dalam Moleong, 2007:248) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data ini akan dilakukan agar proses penyusunan data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditafsirkan. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskripsi analisis kualitatif, dimana peneliti akan menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh dan kemudian akan menganalisis dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Metode deskriptif analitik dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan. Metode deskriptif analitik digunakan dalam penganalisisan data yang sudah ada. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data-data yang sudah diperoleh melalui proses analisis yang mendalam dan selanjutnya dikomunikasikan secara runtut atau dalam bentuk naratif.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008:246), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Tahap analisis data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara di lapangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengayaskan data-data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan atau mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan.

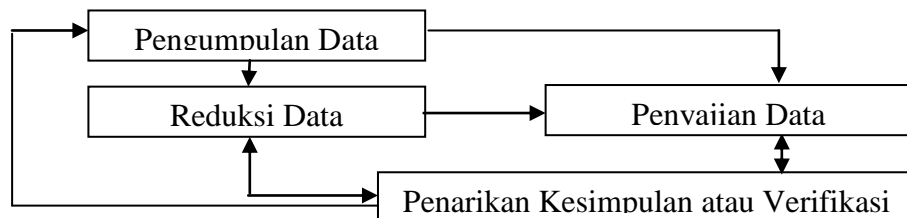
c. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian data merupakan analisis dalam bentuk *matrik*, *network*, *chart* atau grafis sehingga peneliti dapat menguasai data.

d. Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya, jadi dari data tersebut peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat

dalam penelitian. Keempatnya dapat digambarkan dalam bagan berikut (Miles & Huberman, 1992:20):



Bagan Komponen-komponen data model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (1992:17)

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Diawali dengan peneliti melakukan penelitian di lapangan yaitu Bagaimana Peran Masyarakat Dalam Mengelola Obyek Wisata Hutan Pinus Di Desa Mangunan, Kecamatan Dingo Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Setelah itu diadakan seleksi data atau penyederhanaan.